

Artikel Penelitian

Keamanan Jurnalis Sebagai Isu Sumber Daya Manusia Strategis : Analisis Data 2024 untuk Reformasi Manajemen Media

Zandra Dwanita Widodo *

Universitas Tunas Pembangunan (UTP) Surakarta, Indonesia ; email : zandra.widodo@lecture.utp.ac.id

* korespondensi penulis : Zandra Dwanita Widodo

Abstract, *The issue of journalist safety in Indonesia is increasingly urgent to be studied within the framework of strategic human resource management (HR). The work risks faced by journalists not only reflect external pressure from third parties but also indicate the weakness of the internal protection system implemented by media organizations. This study aims to analyze the perception and experience of journalist safety risks and evaluate the role of individual characteristics, organizational responses, and legal support in creating safe and sustainable working conditions. The research method used is a quantitative descriptive approach by utilizing secondary data from the 2024 Journalist Safety Index (IKJ). The data includes 760 journalist respondents from various regions in Indonesia, which were analyzed using frequency distribution techniques, cross tabulations, and simple correlations. The main variables consist of individual journalist characteristics (X1), media organization responses (X2), external legal support (X3), and safety risks (Y1), perceptions of protection (Y2), and psychological resilience (Y3). The results of the study show that female journalists, low-income journalists, and journalists domiciled outside Java have higher levels of risk. The response of media organizations to safety issues is still relatively weak, especially in terms of safety training and provision of protection protocols. Meanwhile, the available legal support is not yet fully effective, but still plays a role in increasing the courage of reporting and the psychological stability of journalists. The conclusion of this study confirms that journalist safety must be an integral part of the media HR management system. Institutional reform, including strengthening internal regulations, legal assistance, and risk-based training, are strategic steps that need to be implemented to build a professional and safe media ecosystem.*

Diterima: April, 15 2025

Direvisi: April, 29 2025

Diterima: Mei, 16 2025

Diterbitkan: Mei, 20 2025

Versi sekarang: Mei, 20 2025



Hak cipta: © 2025 oleh penulis.

Diserahkan untuk

kemungkinan publikasi akses
terbuka berdasarkan syarat dan
ketentuan lisensi Creative
Commons Attribution (CC BY
SA) (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)**Keywords:** *journalist safety, HR management, legal protection, media organizations, work risks.*

Abstrak, Isu keselamatan jurnalis di Indonesia semakin mendesak untuk dikaji dalam kerangka manajemen sumber daya manusia (SDM) yang strategis. Risiko kerja yang dihadapi jurnalis tidak hanya mencerminkan tekanan eksternal dari pihak ketiga, tetapi juga menunjukkan lemahnya sistem perlindungan internal yang diterapkan oleh organisasi media. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi dan pengalaman risiko keselamatan jurnalis serta mengevaluasi peran karakteristik individu, respons organisasi, dan dukungan hukum dalam membentuk kondisi kerja yang aman dan berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder dari Indeks Keselamatan Jurnalis (IKJ) 2024. Data tersebut mencakup 760 responden jurnalis dari berbagai wilayah di Indonesia, yang dianalisis menggunakan teknik distribusi frekuensi, tabulasi silang, dan korelasi sederhana. Variabel utama terdiri

atas karakteristik individu jurnalis (X1), respons organisasi media (X2), dukungan hukum eksternal (X3), serta risiko keselamatan (Y1), persepsi perlindungan (Y2), dan ketahanan psikologis (Y3). Hasil penelitian menunjukkan bahwa jurnalis perempuan, berpendapatan rendah, dan berdomisili di luar Jawa memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi. Respons organisasi media terhadap isu keselamatan masih tergolong lemah, terutama dalam hal pelatihan keselamatan dan penyediaan protokol perlindungan. Sementara itu, dukungan hukum yang tersedia belum sepenuhnya efektif, namun tetap berperan dalam meningkatkan keberanian pelaporan dan stabilitas psikologis jurnalis. Simpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa keselamatan jurnalis harus menjadi bagian integral dalam sistem manajemen SDM media. Reformasi kelembagaan, termasuk penguatan regulasi internal, pendampingan hukum, dan pelatihan berbasis risiko, merupakan langkah strategis yang perlu diimplementasikan untuk membangun ekosistem media yang profesional dan aman.

Kata kunci: keselamatan jurnalis, manajemen SDM, organisasi media, perlindungan hukum, risiko kerja.

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Keselamatan jurnalis merupakan isu fundamental dalam menjamin kebebasan pers dan keberlangsungan praktik jurnalistik yang independen. Dalam konteks Indonesia, dinamika sosial-politik yang kompleks dan heterogen sering kali menghadirkan risiko kerja yang tinggi bagi para jurnalis, baik dalam bentuk kekerasan fisik, tekanan politik, hingga ancaman digital. Hal ini menunjukkan bahwa keselamatan jurnalis bukan sekadar persoalan eksternal, tetapi juga bagian integral dari pengelolaan sumber daya manusia (SDM) dalam institusi media.

Data dari Indeks Keselamatan Jurnalis (IKJ) 2024 yang dirilis oleh Dewan Pers dan Populix menunjukkan adanya kecenderungan yang mengkhawatirkan: sebagian besar jurnalis menyatakan belum merasa sepenuhnya dilindungi oleh institusi tempat mereka bekerja. Dari total 760 responden yang tersebar di seluruh Indonesia, mayoritas berasal dari wilayah Jawa (365 responden), Sumatera (131), dan Kalimantan (65), dengan proporsi jenis kelamin 71,4% laki-laki dan 28,6% perempuan. Data ini mengindikasikan bahwa faktor-faktor seperti wilayah, gender, dan status ekonomi memiliki peran signifikan dalam membentuk persepsi dan pengalaman jurnalis terhadap risiko kerja.

Distribusi pendapatan menunjukkan bahwa 58% responden memiliki penghasilan bulanan antara Rp2.000.001–Rp5.000.000, dan sebagian besar bekerja di media kecil-menengah. Kelompok ini cenderung memiliki akses terbatas terhadap dukungan hukum, pelatihan keselamatan, maupun perlindungan psikososial. Kondisi ini mencerminkan lemahnya sistem manajemen SDM organisasi media dalam mengintegrasikan aspek keselamatan ke dalam kebijakan kerja dan kesejahteraan profesional.

Dari sisi sosial-ekonomi dan fisik wilayah, jurnalis yang bekerja di luar pulau Jawa, terutama di kawasan Indonesia Timur, menghadapi risiko tambahan akibat infrastruktur hukum yang lemah dan intensitas konflik sosial yang tinggi. Situasi ini semakin diperparah dengan belum meratanya pemahaman institusi media terhadap pentingnya sistem perlindungan terintegrasi.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik persepsi dan pengalaman risiko keselamatan jurnalis di Indonesia berdasarkan data IKJ 2024?
2. Bagaimana hubungan antara faktor demografis jurnalis dengan tingkat risiko yang dialami?
3. Sejauh mana respons organisasi media memengaruhi persepsi perlindungan jurnalis?
4. Bagaimana kontribusi dukungan hukum eksternal terhadap keberanian pelaporan dan ketahanan psikologis jurnalis?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan distribusi risiko dan ketimpangan persepsi keselamatan di kalangan jurnalis berdasarkan data kuantitatif IKJ 2024.
2. Menganalisis hubungan antara karakteristik jurnalis dan respons institusional terhadap kondisi keselamatan kerja.
3. Menyusun rekomendasi untuk reformasi manajemen SDM media yang responsif terhadap risiko kerja jurnalis.

Kajian Literatur

Kajian literatur mengenai keselamatan jurnalis menempatkan isu ini dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia dan ketahanan institusional media (Setiawan & Nuryati, 2021). Menurut Yulianto (2022) dalam jurnal *Komunika*, ancaman terhadap jurnalis tidak hanya berasal dari eksternal, tetapi juga mencerminkan kegagalan internal dalam membangun sistem proteksi yang adil dan menyeluruh. Sementara itu, studi oleh Farhan dan Rachmawati (2023) dalam *Jurnal Ilmu Komunikasi Indonesia* menggarisbawahi pentingnya integrasi aspek keselamatan dalam sistem manajemen SDM media, termasuk pelatihan keselamatan, SOP peliputan risiko tinggi, dan dukungan hukum.

Literatur juga menunjukkan bahwa kelembagaan media yang kuat dan beretika mampu membentuk ekosistem kerja yang lebih aman bagi jurnalis (Marpaung, 2022). Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa media di daerah sering kali belum memiliki standar perlindungan minimal yang memadai, baik karena keterbatasan anggaran, kapasitas manajerial, maupun pemahaman terhadap urgensi isu ini.

Profil dan Potensi Khalayak Sasaran

Khalayak sasaran dalam penelitian ini adalah jurnalis aktif di Indonesia yang menjadi responden IKJ 2024. Secara kuantitatif, profil responden terdiri atas jurnalis berusia 25–40 tahun, berpendidikan S1, dengan pengalaman kerja 5–10 tahun. Mereka mayoritas bekerja di media daring lokal dan nasional, dengan tingkat paparan terhadap isu politik, konflik sosial, dan korupsi daerah.

Kondisi sosial mereka menunjukkan adanya keterbatasan jaminan kerja, absennya pelatihan keselamatan, serta minimnya akses terhadap pendampingan hukum dan psikologis. Potensi utama dalam penelitian ini terletak pada data empiris yang representatif secara nasional, yang dapat dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan manajemen SDM berbasis perlindungan kerja.

2. METODOLOGI

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan tujuan untuk menggambarkan karakteristik persepsi dan pengalaman risiko keselamatan jurnalis berdasarkan data empiris yang dikumpulkan oleh Dewan Pers dalam *Indeks Keselamatan Jurnalis (IKJ) 2024*. Desain ini dipilih untuk memperoleh pemetaan statistik dari gejala-gejala yang muncul secara sistematis dan objektif, tanpa manipulasi terhadap variabel penelitian (Sugiyono, 2019).

Penelitian ini memusatkan analisis pada hubungan antara variabel-variabel bebas yang mencakup:

- **X1** = Karakteristik individu jurnalis (jenis kelamin, wilayah domisili, dan pendapatan);
 - **X2** = Respons organisasi media (SOP, pelatihan, dukungan psikososial);
 - **X3** = Dukungan hukum eksternal (akses dan efektivitas perlindungan hukum)
- dan variabel terikat, yaitu:
- **Y1** = Tingkat risiko keselamatan yang dialami jurnalis;
 - **Y2** = Persepsi terhadap perlindungan dari organisasi;
 - **Y3** = Keberanian pelaporan dan ketahanan psikologis jurnalis.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian adalah seluruh jurnalis Indonesia yang menjadi responden dalam survei IKJ 2024. Berdasarkan laporan, jumlah responden adalah sebanyak 760 orang yang

tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan proporsi gender 71,4% laki-laki dan 28,6% perempuan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah keseluruhan data responden tersebut, sehingga metode yang digunakan bersifat sensus (total population sampling)

Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa tabulasi survei IKJ 2024 yang dikumpulkan oleh Dewan Pers dan Populix. Data dikumpulkan melalui kuesioner daring yang telah disusun dalam format skala ordinal dan skala Likert. Variabel-variabel yang dianalisis terdiri dari data kuantitatif tentang pengalaman kekerasan, dukungan organisasi, serta persepsi terhadap perlindungan hukum.

Instrumen yang digunakan oleh pihak pengumpul data telah melalui uji validitas dan reliabilitas, dengan hasil yang menunjukkan bahwa semua konstruk memiliki nilai Cronbach's Alpha di atas 0,70, yang menandakan reliabilitas internal yang baik (Santosa & Wibisono, 2022).

Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif untuk memperoleh gambaran umum distribusi variabel. Selanjutnya, hubungan antarvariabel diuji menggunakan teknik tabulasi silang dan korelasi Pearson untuk menentukan kekuatan dan arah hubungan antara variabel bebas dan terikat. Analisis dilakukan terhadap pertanyaan penelitian berikut:

1. Karakteristik persepsi dan pengalaman risiko keselamatan jurnalis dijelaskan melalui distribusi data frekuensi dan persentase berdasarkan gender, domisili, dan pendapatan.
2. Hubungan antara karakteristik individu jurnalis (X1) dan risiko keselamatan (Y1) dianalisis dengan teknik korelasi.
3. Pengaruh respons organisasi media (X2) terhadap persepsi perlindungan (Y2) dilihat dari pola respon dan asosiasi data.
4. Kontribusi dukungan hukum (X3) terhadap keberanian pelaporan dan ketahanan psikologis (Y3) dijelaskan melalui distribusi dan pola hubungan antar indikator.

Model Penelitian

Model penelitian ini menggambarkan bahwa:

- X1 (Karakteristik Individu) berpengaruh terhadap Y1 (Tingkat Risiko Keselamatan);
- X2 (Respons Organisasi Media) memengaruhi Y2 (Persepsi terhadap Perlindungan Organisasi);
- X3 (Dukungan Hukum Eksternal) berdampak pada Y3 (Keberanian Pelaporan dan Ketahanan Psikologis).

Hubungan ini divisualisasikan dalam kerangka konseptual yang telah dikembangkan dalam bagian sebelumnya, yang mencerminkan interaksi antara determinan individual, institusional, dan struktural terhadap keselamatan kerja jurnalis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses dan Rentang Waktu Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari *Indeks Keselamatan Jurnalis (IKJ) 2024* yang dihimpun oleh Dewan Pers bekerja sama dengan Populix. Pengumpulan data dilakukan melalui survei daring pada akhir tahun 2023 dan awal tahun 2024, dengan total responden sebanyak 760 jurnalis yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Analisis dilakukan pada bulan Mei 2025 menggunakan pendekatan statistik deskriptif dan tabulasi silang untuk mengevaluasi pola hubungan antarvariabel yang telah dirumuskan sebelumnya.

Hasil Analisis Data

1. Karakteristik Persepsi dan Risiko Keselamatan Jurnalis

Berdasarkan hasil tabulasi data, mayoritas responden merupakan jurnalis laki-laki (71,4%) dan perempuan (28,6%). Responden terbanyak berasal dari wilayah Jawa (365 orang), diikuti oleh Sumatera (131), Kalimantan (65), Sulawesi (80), dan wilayah Indonesia Timur lainnya.

Tabel 1. Distribusi Jenis Kelamin Jurnalis Responden

Kategori	Jumlah	Persentase (%)
Laki-laki	543	71.4
Perempuan	217	28.6

Sebagian besar jurnalis yang disurvei mengungkapkan bahwa mereka merasa tidak sepenuhnya aman saat menjalankan tugas jurnalistik, terutama dalam konteks peliputan isu politik, korupsi, dan konflik sosial. Persepsi risiko meningkat di wilayah dengan intensitas konflik tinggi seperti Kalimantan dan Maluku Utara, serta pada media lokal yang tidak memiliki sistem perlindungan internal.

2. Hubungan antara Faktor Demografis dan Tingkat Risiko

Analisis terhadap variabel demografis menunjukkan bahwa jurnalis perempuan lebih banyak melaporkan pengalaman kekerasan verbal dan intimidasi daring dibandingkan jurnalis laki-laki. Sementara itu, responden dari wilayah di luar Jawa, seperti Kalimantan dan Indonesia Timur, menunjukkan tingkat persepsi risiko yang lebih tinggi, terutama dalam konteks peliputan isu adat dan agraria.

Korelasi antara tingkat pendapatan dan persepsi risiko juga menunjukkan kecenderungan bahwa jurnalis dengan penghasilan rendah (di bawah Rp5 juta) merasa kurang dilindungi dan lebih rentan secara fisik maupun psikologis, sejalan dengan temuan Santosa & Wibisono (2022) bahwa kelas ekonomi jurnalis memengaruhi akses terhadap dukungan keamanan kerja.

3. Pengaruh Respons Organisasi Media terhadap Persepsi Perlindungan

Respons organisasi media dalam menyediakan perlindungan terbukti masih sangat terbatas. Sebagian besar jurnalis menyatakan bahwa media tempat mereka bekerja tidak menyediakan pelatihan keselamatan, tidak memiliki SOP peliputan krisis, dan tidak memberikan dukungan psikologis pascakejadian.

Temuan ini mendukung hasil penelitian Yulianto (2022) yang menyatakan bahwa lemahnya sistem perlindungan internal organisasi media menjadi salah satu penyebab utama ketidakamanan jurnalis, terutama pada media lokal dan kecil. Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk reformasi kebijakan SDM dalam media agar lebih responsif terhadap risiko kerja.

4. Kontribusi Dukungan Hukum terhadap Keberanian Pelaporan

Data menunjukkan bahwa persepsi terhadap dukungan hukum eksternal sangat beragam. Jurnalis yang memiliki akses terhadap bantuan hukum, misalnya melalui organisasi profesi atau LBH, menunjukkan keberanian yang lebih tinggi dalam melaporkan kekerasan atau intimidasi. Namun demikian, mayoritas responden menyatakan bahwa proses hukum terhadap kasus kekerasan terhadap jurnalis masih lambat dan tidak memberikan efek jera kepada pelaku.

Hal ini sejalan dengan temuan Marpaung (2022) yang menyatakan bahwa ketidakefektifan sistem hukum dalam melindungi jurnalis menyebabkan terjadinya self-censorship dan penurunan keberanian investigasi, terutama pada isu-isu sensitif seperti korupsi dan HAM.

Interpretasi dan Implikasi Penelitian

Secara teoritis, hasil penelitian ini memperkuat konsep bahwa keselamatan kerja merupakan bagian integral dari manajemen SDM strategis di organisasi media. Kegagalan institusi dalam membangun sistem perlindungan yang komprehensif tidak hanya membahayakan jurnalis secara individu, tetapi juga melemahkan integritas pers sebagai pilar demokrasi.

Secara praktis, hasil ini memberikan implikasi bahwa perlu dikembangkan model manajemen risiko jurnalis yang bersifat terintegrasi, melibatkan dimensi pelatihan keselamatan, perlindungan hukum, serta sistem pelaporan internal yang aman. Selain itu, dukungan pemerintah dan lembaga profesi sangat penting untuk memperkuat regulasi dan implementasi standar keselamatan kerja jurnalis.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data Indeks Keselamatan Jurnalis (IKJ) 2024 dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Karakteristik persepsi dan risiko keselamatan jurnalis menunjukkan tingginya tingkat ketidakamanan kerja di kalangan jurnalis Indonesia, terutama di wilayah dengan konflik sosial tinggi dan pada media yang tidak memiliki sistem perlindungan internal.

- b. Faktor demografis seperti jenis kelamin, wilayah domisili, dan tingkat pendapatan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat risiko yang dialami jurnalis. Jurnalis perempuan dan mereka yang berasal dari wilayah di luar Jawa cenderung menghadapi risiko yang lebih tinggi.
- c. Respons organisasi media masih terbatas, ditunjukkan dengan absennya pelatihan keselamatan, SOP kerja berbasis risiko, serta dukungan psikologis yang memadai. Hal ini berimplikasi pada rendahnya persepsi perlindungan jurnalis terhadap institusi tempat mereka bekerja.
- d. Dukungan hukum eksternal masih dirasakan kurang efektif, meskipun keberadaannya memengaruhi keberanian jurnalis dalam melaporkan kekerasan dan memperkuat ketahanan psikologis mereka. Hambatan akses dan lemahnya penegakan hukum menjadi faktor pembatas utama.

Dengan demikian, keselamatan jurnalis di Indonesia belum sepenuhnya terjamin baik secara struktural (regulasi dan dukungan hukum) maupun kultural (manajemen risiko dalam organisasi media). Temuan ini menguatkan urgensi reformasi manajemen SDM di sektor media sebagai bagian dari perlindungan profesional yang komprehensif

5. REKOMENDASI KEBIJAKAN

Berdasarkan simpulan di atas, berikut adalah rekomendasi teoritis dan praktis:

A. Rekomendasi Teoritis

1. Penelitian lanjutan perlu dilakukan dengan pendekatan multivariat untuk menguji pengaruh antarvariabel secara lebih mendalam menggunakan model SEM atau regresi logistik.
2. Konsep keselamatan jurnalis perlu diperluas dalam kajian manajemen SDM strategis, khususnya dalam literatur komunikasi organisasi dan tata kelola risiko kerja.

B. Rekomendasi Praktis

1. Organisasi media. **Peningkatan koordinasi** antara organisasi media, aparat hukum, dan lembaga advokasi untuk jurnalis. Perlu mengintegrasikan kebijakan perlindungan keselamatan jurnalis ke dalam sistem manajemen SDM, termasuk pelatihan rutin, protokol peliputan risiko, dan dukungan psikologis.
2. Dewan Pers dan asosiasi profesi. Penerapan Standar Nasional Keamanan Jurnalis oleh organisasi media dan Dewan Pers dengan indikator evaluatif berbasis SDM. Seperti AJI dan PWI perlu memperkuat fungsi advokasi dan monitoring dengan berbasis data longitudinal dari indeks keselamatan tahunan.
3. Pemerintah melalui Kemkominfo dan aparat penegak hukum harus menjamin akses hukum dan proses yang cepat terhadap kasus kekerasan jurnalis, serta menerapkan sanksi tegas kepada pelaku.
4. Lembaga pendidikan jurnalistik. **Pelatihan keselamatan jurnalis** sebagai bagian dari kurikulum SDM dan HRD media. Perlu menyisipkan modul keselamatan kerja dan manajemen risiko dalam kurikulum, guna membekali calon jurnalis dengan pengetahuan praktis dan kesadaran profesional sejak dini.

Reformasi menyeluruh dalam sistem perlindungan jurnalis tidak hanya memperkuat posisi profesi ini, tetapi juga berkontribusi pada penguatan demokrasi dan keberlanjutan ekosistem media di Indonesia.

-
- [1] Dewan Pers & Populix, *Laporan Indeks Keselamatan Jurnalis 2024*. Jakarta: Dewan Pers, 2024.
- [2] T. Hanitzsch, A. Van Dalen, and N. Steindl, "Caught in the nexus: A comparative and longitudinal analysis of public trust in the press," *The International Journal of Press/Politics*, vol. 24, no. 1, pp. 3–23, 2019, doi: 10.1177/1940161218793051.
- [3] T. Marpaung, "Sistem Perlindungan Jurnalis di Indonesia: Kelemahan Struktural dan Tantangan Implementasi," *Jurnal Ilmu Komunikasi*, vol. 14, no. 2, pp. 101–112, 2022, doi: 10.24002/jik.v14i2.5892.
- [4] H. Santosa and R. Wibisono, "Validasi Instrumen Keselamatan Jurnalis Berbasis Konteks Lokal," *Jurnal Komunikasi Global*, vol. 11, no. 1, pp. 55–67, 2022.
- [5] B. Setiawan and A. Nuryati, "Manajemen Risiko dan Perlindungan Jurnalis dalam Organisasi Media," *Jurnal Studi Komunikasi*, vol. 5, no. 3, pp. 475–488, 2021, doi: 10.25139/jsk.v5i3.3713.
- [6] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- [7] E. C. Tandoc Jr., J. Jenkins, and R. J. Thomas, "Journalism under threat: The psychological toll of reporting," *Digital Journalism*, vol. 10, no. 2, pp. 239–255, 2022, doi: 10.1080/21670811.2021.1907200.
- [8] A. Yulianto, "Perlindungan Jurnalis dalam Perspektif Etika Profesi," *Komunika: Jurnal Ilmu Komunikasi*, vol. 16, no. 1, pp. 45–57, 2022, doi: 10.24090/komunika.v16i1.6340.